



DINAMIKA POLITIK PARTAI NAHDLATUL ULAMA DI SEMARANG TAHUN 1952-1979

Akhmad Sayuti, Wasino, Ibnu Sodiq[✉]

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2018

Disetujui Juni 2018

Dipublikasikan Juli 2018

Keywords:

Political Dynamics, Islamic Party, Nahdlatul Ulama.

Abstrak

Nahdlatul Ulama merupakan *jam'iyyah* yang didirikan oleh ulama-ulama tradisional yang menganut aliran *Ahlusunnah Wal Jam'ah* dan pengusaha Jawa Timur pada tahun 1926 di Surabaya. Awalnya NU bergerak dibidang sosial keagamaan yang memfokuskan kegiatannya pada pendidikan, ekonomi, dan penyiaran agama Islam, namun pada perkembangannya NU mulai ikut dalam pergerakan politik nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan politik NU di Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu heuristic, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, yakni penulisan secara kronologis sebagai hasil penelitian sejarah. Hasil penelitian ini adalah NU di Kota Semarang didirikan oleh KH. Ridwan pada tahun 1926 yang merupakan salah satu ulama yang ikut dalam pendirian NU di Surabaya. Perolehan suara pada Pemilu 1955 merupakan bukti bahwa NU kalah dengan PKI dan PNI, namun NU menjadi partai Islam terbesar di Kota Semarang mengalahkan Masyumi yakni PKI 92.172, PNI 27.619, NU 19.292, dan Masyumi 6.191. Pada perkembangannya NU berfusi menjadi PPP. Muktamar ke-26 di Kota Semarang merupakan langkah NU kembali menjadi *jam'iyyah* dan menyerahkan kegiatan politik kepada PPP.

Abstract

Nahdlatul Ulama is a jami'yah founded by traditional ulama who embrace Ahlussunnah Wal Jamah and East Java entrepreneurs in 1926 in Surabaya. NU initially engaged in religious social activities that focus on education, economy, and proselytism of Islam, but in its development NU began to participate in the national political movement. The purpose of this study is to describe the political development of NU in Semarang City. The method used in this research is historical method, namely heuristic, source criticism, Interpretation, and historiography, is chronological writing as a result of historical research. The results of this research are NU branch in Semarang City established by KH. Ridwan in 1926 which is one of the scholars who participated in the establishment of NU in Surabaya. The vote in 1955 election is a proof that NU was defeated by the PKI and PNI. However, NU became the largest Islamic party in Semarang City and defeated Masyumi, the result are as followed PKI 92.172, PNI 27.619, NU 19.292, and Masjumi 6.191. In its development NU fused into PPP. The 26th Congress in Semarang City was the turning point of NU back to jami'yah and submit political activities to the PPP.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU tidak lepas dari lingkaran politik sebagai organisasi yang potensial dalam menyumbangkan suara karena memiliki massa yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal inilah yang menjadikan suara NU begitu diminati oleh partai-partai politik di Indonesia menjelang pemilihan umum daerah maupun pemilihan presiden. Namun demikian, NU memiliki sejarah panjang bahkan pernah terlibat dalam politik praktis pada kurun waktu tahun 1952 sampai 1971. Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang terbentuk pada tahun 1926 di Surabaya oleh tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. Pada perkembangannya NU masuk dalam dunia politik bergabung dalam beberapa federasi seperti MIAI, GAPPI, Korindo dan akhirnya tergabung dalam Partai Masyumi, namun karena banyak perbedaan pandangan akhirnya NU keluar dan menjadi partai politik dengan nama Partai Nahdlatul Ulama (Siregar, 2014:1). Pada perkembangannya, NU berhasil membuka cabang-cabangnya salah satunya di Kota Semarang. Berdirinya NU di Kota Semarang tidak lepas dari peran KH. Ridwan yang ikut dalam pendirian NU di Surabaya (Shokheh, 2014:176).

Kota Semarang memiliki posisi unik dalam perkembangan NU. Selama ini Kota Semarang diidentikkan sebagai kota basis PKI dan PNI. Akan tetapi, ternyata selain dua partai politik tersebut NU di kota ini mampu tampil secara gemilang pada pemilu tahun 1952 sampai tahun 1971. Namun demikian, ada beberapa peristiwa penting selama perkembangan NU di Kota Semarang yaitu Kota Semarang pernah menjadi kota pertama di Jawa Tengah yang menjadi penyelenggara Muktamar NU ke-4 pada tahun 1929 (Bruinessen, 1994:17). Selanjutnya selama menjadi partai politik, Partai NU di Kota Semarang harus mengirim anggotanya untuk pendidikan kader Nasakom yang diadakan Presiden Soekarno pada awal tahun 1960-an (Anam, 2010: 291).

Pada awal tahun 1965 situasi politik di Indonesia mulai memanas. PKI melakukan tekanan-tekanan kepada lawan politiknya termasuk NU. Sikap ofensif PKI selalu dibayang-bayangi NU sampai ke beberapa daerah termasuk di Kota Semarang. Partai NU melalui Banser Ansor menunjukkan eksistensi dengan melakukan pawai dan kampanye untuk menunjukkan bahwa NU memiliki massa dan kekuatan yang besar di Kota Semarang. Selanjutnya pada masa pergolakan tahun 1965, NU melalui GP Ansor ikut andil dalam penumpasan peristiwa G30S/PKI bersama Kodam VII/Diponegoro di Kota Semarang (Cribb, 1990:269).

Pada masa Orde Baru, kegiatan terbesar Partai NU di Kota Semarang adalah menjadi peserta pemilu tahun 1971 sekaligus menjadi agenda terakhir NU sebagai partai politik di Indonesia sebelum akhirnya harus berfusi ke dalam PPP karena kebijakan politik pemerintahan Orde Baru sebagai usaha untuk menyederhanakan partai politik di Indonesia. Pada 5 Januari 1973 PPP resmi dibentuk yang terdiri dari gabungan Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Keberadaan PPP menjadi wadah baru bagi umat Islam untuk terus berpolitik. Pada pemilihan umum tahun 1977 PPP berhasil menambah perolehan suaranya menjadi 29,3% dan menambah kursi DPR menjadi 99 kursi (Haidar, 2011:230). Setelah bergabung dalam PPP, muncul wacana NU untuk kembali menjadi *jam'iyyah* dikarenakan NU sudah terlalu lama melupakan tujuan awal pendiriannya. Maka pada pertengahan tahun 1970-an, NU melakukan konferensi besar di Jakarta dan memutuskan untuk kembali menjadi *jam'iyyah*.

METODE PENELITIAN

Menurut Garraghan, sejarah sebagai ilmu dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang di maksudkan untuk membantu dengan efektif dalam pengumpulan bahan-bahan dari sumber sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis dan menyajikan dalam suatu sinthese (pada umumnya dalam

bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Wasino, 2007:9). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah menurut Gottschalk (1985:32) merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dari peninggalan masa lampau. Ada empat langkah dalam prosedur penelitian sejarah yaitu (a) Heuristik, dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penulis menggunakan sumber dari arsip-arsip dan foto yang diambil dari berbagai instansi seperti arsip Nahdlatul Ulama yang tersimpan di Badan Arsip Nasional Indonesia, foto-foto yang tersimpan di perpustakaan PBNNU, arsip GP Ansor Jawa Tengah dan foto-foto Pemilu pertama di Kota Semarang yang tersimpan di Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah, hasil pemilu tahun 1955 Kota Semarang yang tersimpan di KPU Kota Semarang, dan Koran-koran tahun 1952-1979 yang ada di Depo Arsip Suara Merdeka. Kemudian sumber sekunder penulis menggunakan beberapa buku yang relevan seperti Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama yang merupakan buku babon NU dan Ijtihad Partai Ulama yang berisi tentang sejarah Partai NU pada masa Orde Lama; (b) Kritik Sumber, yaitu upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik Sumber ini dilakukan dengan dua cara yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan peneliti dengan melihat tanggal dan tahun yang dicantumkan, logo, stempel yang digunakan dalam data maupun dokumen yang didapatkan. Kemudian dalam kritik intern penulis melakukan penilaian dengan membandingkan isi atau informasi satu dengan yang lainnya; (c) Interpretasi, pada tahap ini data yang diperoleh diseleksi, dimana penulis menentukan data mana yang harus ditinggalkan dalam penulisan sejarah dan dipilih mana yang relevan. Fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap kritik sumber dihubungkan atau saling dikaitkan sehingga pada akhirnya akan menjadi suatu rangkaian yang bermakna; dan (d) Historiografi, merupakan cara merekonstruksi gambaran masa lalu secara imajinatif

berdasarkan data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menyajikan hasil penelitiannya dalam tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan serialisasi (kronologis, kausasi dan imajinasi) (Gottschalk, 1985: 35).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Semarang

Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejarah yang panjang. Sebelum menjadi kota, Semarang merupakan karesidenan yang terbentuk pada 1 Januari 1901. Karesidenan Semarang secara geografis terletak di pantai utara Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Karesidenan Rembang di sebelah timur, Karesidenan Madiun, Karesidenan Surakarta, dan Karesidenan Kedu di sebelah selatan, dan Karesidenan Pekalongan di sebelah barat. Pada perkembangannya, Semarang berkembang dengan pesat dimulai dari perubahan status menjadi *gemeente* atau kotapraja sampai munculnya bangsa asing yang singgah dan menetap di Kota Semarang yang kemudian menjadi penggerak kehidupan yang berdampak pada ekonomi, budaya, politik dan agama di kota ini (Kasmadi dan Wiyono, 1985:5).

Sejarah perkembangan politik di Kota Semarang berasal dari munculnya organisasi politik dan organisasi masyarakat yang mulai muncul pada masa pergerakan nasional. Sejak masa kolonial Belanda, terdapat organisasi-organisasi sosial politik yang muncul dan berkembang di Kota Semarang sampai tahun 1955 bahkan sebagian berafiliasi dengan partai politik seperti Gerwani, Barisan Tani Indonesia, Lekra, dan beberapa organisasi buruh menjadi bagian dari PKI, LKN dengan PNI, Muslimat/Fatayat, GP Ansor dengan Partai NU, dan GPII dengan Masyumi (Kasmadi dan Wiyono, 1985:53-56). Dengan demikian, pergerakan politik di Kota Semarang tidak lepas dari pergerakan politik nasional yang dipelopori oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial dan politik yang kemudian menjadi dasar mobilitas politik di Kota Semarang setelah berafiliasi dengan partai politik yang dipilihnya.

Perkembangan Nahdlatul Ulama di Kota Semarang Sebelum Tahun 1952

Sebelum NU menjadi sebuah *jam'iyyah*, NU merupakan *jama'ah* yang bersifat lokal bernama *Nahdlatul Wathan*. *Jama'ah* ini didirikan oleh KH. A Wahab Chasbullah bersama KH. Mas Mansur pada tahun 1914 di Surabaya yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal berupa madrasah dan kursus pembentukan kader kepemimpinan. Dalam waktu singkat, *Nahdlatul Wathan* telah berhasil mendirikan cabang-cabangnya di berbagai daerah termasuk di Kota Semarang dengan nama *Akhul Wathan* (Haidar, 2011:48). Tidak ada bukti siapa tokoh lokal dibalik dibukanya *Nahdlatul Wathan* di Kota Semarang, namun pembukaan cabang-cabang *Nahdlatul Wathan* di berbagai daerah tidak lepas dari peran KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH. Mas Alwi yang menjadi tokoh sentral (Zuhri, 1972:15). Pada perkembangannya, madrasah *Nahdlatul Wathan* terus mengalami perkembangan di berbagai cabang di daerah termasuk di Kota Semarang yang terletak di Jomblangan Kidul yang kemudian menjadi pusat madrasah *Nahdlatul Wathan* di Jawa Tengah (Anam, 2010:90). Pada tahun 1929 di Kampung Ngabangan berdiri sebuah sekolah di bawah NU Cabang Kota Semarang yang mendapat sambutan baik oleh masyarakat sekitar dan memiliki jumlah murid kurang lebih mencapai 80 orang (Shokheh, 2014:176).

NU cabang Semarang diperkirakan berdiri tahun 1926, beberapa saat setelah berdirinya NU di Surabaya. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa Kiai Ridwan merupakan *kiai* dari Kota Semarang yang juga ikut dalam perkumpulan ulama untuk mendeklarasikan pendirian NU di Surabaya (Shokheh, 2014:173). NU Cabang Semarang dipercaya sebagai penyelenggara Muktamar NU ke-4 pada 17-20 September 1929. Kegiatan muktamar dipusatkan di Hotel Arabistan, Kampung Melayu dan acara penutupannya dilakukan di Masjid Jami' Kota Semarang. Muktamar di Kota Semarang merupakan muktamar pertama yang diselenggarakan di luar provinsi Jawa Timur (Bruinessen, 1994:49).

Sebagai *jam'iyyah*, NU memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah salah satunya dengan mendidik *Da'i* atau *Muballigh*, mengadakan penyuluhan agama kepada masyarakat, dan menerbitkan brosur dan majalah seperti *Swara Nahdlatoel Oelama*, *Oetoesan Nahdlatoel Oelama*, *Berita Nahdlatoel Oelama* dan lainnya. Di bidang sosial kemasyarakatan, setiap hari jum'at dalam seminggu NU mengadakan pertemuan yang termasuk tradisi yang dilakukan NU dari pusat (Pengurus Besar) sampai dengan ranting-rantingnya. Pertemuan tersebut berupa pengajian agama yang dipimpin oleh *kiai* kemudian diteruskan dengan *tahlilan* untuk arwah warga NU setempat yang sudah meninggal dunia (Anam, 2010:92). Dalam bidang ekonomi, NU Cabang Semarang memiliki yayasan *Muawanah lil Muslimin* (Ya Mualim) terletak di jalan Mataram. Yayasan tersebut merupakan amal usaha NU untuk pendanaan pemberangkatan calon jamaah haji di Kota Semarang. Yayasan tersebut dipimpin oleh H. Anwar Hadi Suyanto dari Mugas (Wawancara dengan Djawahir Muhammad).

NU memiliki basis massa di pedesaan dan pesantren di pinggiran Kota Semarang. Biasanya pesantren yang menjadi basis massa NU merupakan pesantren yang dipimpin atau dibawah asuhan para *kiai* yang menjadi simpatisan NU atau menganut ajaran salah satu dari empat mazhab. Pesantren-pesantren tersebut tersebar di berbagai daerah di Semarang namun yang paling menonjol menjadi basis massa NU biasanya pesantren yang terletak di daerah pinggiran Kota Semarang seperti Mangkang, Terboyo, Pedurungan, dan Gunung Pati. Pada perkembangannya, empat daerah tersebut merupakan basis utama pendukung NU (Wawancara dengan Kiai Ahmad Sya'roni).

Dinamika Partai Nu Di Kota Semarang Tahun 1952-1979

Nahdlatul Ulama Keluar dari Masyumi. Selama beberapa tahun bersama Masyumi, akhirnya NU memutuskan untuk keluar dan mengubah status *jam'iyyah* menjadi partai politik. Keputusan tersebut berdasarkan Muktamar NU ke-19 di Palembang pada tanggal 28 April sampai 1 Mei

1952 dengan perbandingan suara 61 suara setuju, 9 menolak, dan 7 setuju dengan syarat melakukan perundingan dengan Masyumi, dan keputusan ini dijalankan dalam hubungan luas (Haidar, 2011:153). Keputusan tersebut ditanggapi dengan serius oleh para ulama NU dengan melakukan rapat di Jombang untuk memantapkan NU keluar dari Masyumi setelah perundingan NU dengan Masyumi gagal (Suara Merdeka, Selasa 29 Juli 1952).

Perubahan status NU menjadi partai politik memaksa NU harus melakukan pemberahan dalam tubuh NU. Langkah yang diambil PBNU adalah perluasan keanggotaan secara cepat, penghidupan kembali dan membuka cabang-cabang baru, pembentukan berbagai sub-bidang baru untuk melayani kelompok pendukung khusus seperti buruh dan mahasiswa, penerbitan media massa, dan pembangunan basis dana yang kuat (Fealy, 2003:137). Langkah tersebut merupakan upaya untuk merubah NU menjadi partai yang mampu bersaing dalam kancah politik nasional. Dalam hal perluasan anggota di Kota Semarang, pada tahun 1957 NU mendirikan ranting baru di Kampung Tjelengan di Jalan Abimanyu VI/30. Susunan pengurus Ranting Tjelengan terdiri dari anggota Syuriyah: Chamin, Abdul Kadir, dan Ichsan dan anggota Tanfidziyah terdiri Ketua: Sukarmin, Wakil Ketua: Syafii, Sekretaris: Abdul Kadir dan Drujat, Bendahara: Moh. Said (Suara Merdeka, Kamis 28 Februari 1957).

Ketika masa perubahan menjadi sebuah partai politik, Partai NU tetap mempertahankan struktur kepemimpinan formalnya yaitu *Syuriyah* dan *Tanfidziah*. Ini menunjukkan meskipun sebagai partai politik NU memasuki perjuangan yang bersekala luas, tetapi NU tidak melepaskan karakteristik sebagai organisasi yang dilahirkan dengan motif keagamaan (Yusuf dkk, 1983:43). Pada awal tahun 1957, Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah melakukan konferensi yang salah satu keputusannya adalah memilih pengurus baru dan dewan partai. Berdasarkan konferensi tersebut telah memilih susunan pengurus sebagai berikut: (a) Pengurus Syuriyah terdiri dari: Rois KH Zuber, Wakil Rois KH A Djalil Hamid dan K Abu Amar. A'wan: KH Ibrahim, KH Abd.

Chamid, KH Karim dan K Sulchan. Katib: KH Chalil dan Alwi Sofwan; (b) Pengurus Tanfidziyah terdiri dari: Ketua Imam Sofwan, Wakil Ketua I K.A. Malik, Wakil Ketua II KH Machali, dan Sekretaris Hadi Sujanto (Suyanto); dan (c) Dewan Partai terdiri dari: Imam Sofwan, Iskandar Tjokrowinoto, Moh. Ridhwan, H Fachruri dan H Andi Patopppoy. Pelindung: KH Asnawi, KH Baidhowi dan KH Dalhar (Suara Merdeka, 19 Februari 1957).

Status NU yang berubah menjadi partai juga harus menyesuaikan diri dengan budaya politik pada masa itu yang memiliki organisasi-organisasi partai. Pada tahun 1950, Partai NU di Kota Semarang hanya memiliki dua organisasi politik yaitu GP Ansor dan Muslimat/Fatayat NU meski kegiatan dua organisasi tersebut lebih banyak dibidang sosial tapi organisasi tersebut juga ikut dalam pergerakan politik di Kota Semarang (Kasmadi dan Wiyono, 1985:53-56). Memasuki pertengahan periode tahun 1950, NU mendirikan organisasi baru untuk melayani kelompok pendukung khusus seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia (Lesbumi) dan berbagai organisasi lainnya yang bernaung dibawah NU.

Langkah Partai Nahdlatul Ulama. Dalam Islam, Islam Moderat mengandung makna mau menerima dan menghormati perbedaan golongan tanpa menyalahkan golongan lain dan menyatakan golongannya paling benar. Dalam konteks ini, NU memahami bagaiman Islam disebarluaskan dengan cara damai, tidak memaksa pemeluk lain untuk masuk agama Islam, menghargai budaya yang tengah berjalan, dan bahkan mengakomodasikannya ke dalam kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya. Islam moderat juga menuntut toleransi dan menjaga kerukunan seperti halnya yang dilakukan NU dan Muhammadiyah dalam mengenalkan Islam di Indonesia (Miftahuddin, Harmoni: 3-5). Sikap moderat ini mendominasi pemikiran politik NU selama kurun waktu

1950an dan 1960an yang artinya ketika NU menjadikan diri menjadi partai politik setelah memisahkan diri dari Masyumi. NU juga menganggap dirinya bukan sekedar berada ditengah tetapi juga mampu menjadi penengah antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam demi mencapai suatu kondisi politik yang lebih harmonis dan terpadu (Fealy, 1998).

Keputusan NU menjadi partai politik tentu tidak melepaskan karakter Islam yang sudah melekat lama dalam tubuh NU. NU merupakan organisasi Islam yang memiliki wawasan keagamaan yang berakar pada tradisi keilmuan abad pertengahan yaitu *Ahlussunah Wal Jama'ah*. Hal ini juga yang menjadi tujuan dan maksud Partai NU yaitu menegakkan Syariat Islam berdasarkan empat mazhab yang dianutnya. Tujuan tersebut tertulis pada Anggaran Dasar (AD) Partai NU. Selain itu, Partai NU juga memiliki tugas pokok yaitu menyuarakan faham dan ajaran agama Islam yang berhaluan *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang menjadi tugas utama NU selain beberapa tugas pokok lain seperti: (a) Memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan agama Islam; (b) Mengembangkan tentang perilaku Akhlakul-Karimah (budi pekerti luhur) disegala sisi kehidupan agar terwujudnya masyarakat Islamiyah dalam arti luas; (c) Menyerukan persatuan dan kesatuan langkah umat Islam terutama para ulama; (d) Menjalin hubungan dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam di seluruh dunia; € Menggiatkan kegiatan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dengan sebaik-baiknya; dan (f) Mengurus segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perwakafan dan sebagainya (Departemen Penerangan, 1961:448-449).

Kampanye dan Hasil Pemilihan Umum di Kota Semarang. Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dan memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional (Budiardjo, 2009:404). Di negara demokrasi partai politik relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai kepentingannya melalui sosialisasi politik.

Fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya untuk menciptakan citra bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum sebagai tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum (Budiardjo, 2009: 408).

Persiapan NU menyambut pemilu pertama berupa membentuk dewan khusus yang menangani masalah pemilu bernama *Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama* (Lapunu). Lapunu bertanggung jawab untuk menangani segala urusan yang berhubungan dengan pemilu, termasuk pengaturan logistik, pelatihan juru kampanye, perumusan strategi, penyusunan dan pemeriksaan daftar para calon, pengumpulan dana, hubungan dengan pejabat yang berwenang, dan pengumpulan hasil pemungutan suara (Fealy, 2003:186). Struktur Lapunu menyerupai NU dengan dewan pengurus dari tingkat nasional hingga cabang-cabang NU di daerah termasuk di Kota Semarang yang terletak di Kampung Melayu, Kota Semarang.

Perolehan suara Partai NU dan tiga partai besar di Kota Semarang bisa dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Hasil Pemilihan Umum di Kota Semarang Berdasarkan Empat Partai Besar di Indonesia Tahun 1955

Partai	Pemilu untuk Parlemen	Pemilu untuk Konstituante
PKI	97.152	92.172
PNI	21.485	27.619
NU	18.913	19.292
Masyumi	6.407	6.191

Sumber: KPU Kota Semarang.

Berdasarkan table 1, perolehan suara Partai NU di Semarang pada pemilu tersebut sebesar 18.913 suara atau 10,5% dari suara yang masuk di Kota Semarang. Perolehan suara NU di Kota Semarang naik 5% pada pemilu konstituante yang diselenggarakan pada akhir tahun 1955. Selanjutnya pada pemilu daerah yang diselenggarakan tahun 1957-1958, mayoritas perolehan suara NU mengalami penurunan kecuali di Jawa Tengah yang bertambah 93.262 suara menjadi 1.865.568 suara

atau naik 5,3% dari pemilu tahun 1955. Hasil pemilu daerah untuk wilayah Jawa Tengah bisa dilihat tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Pemilihan Umum Daerah untuk Wilayah Jawa Tengah Tahun 1957-1958

Kota	Perolehan Suara	Kabupaten	Perolehan Suara
Semarang	20.353	Semarang	91.942
Pekalongan	13.786	Pekalongan	149.074
Tegal	3.803	Tegal	83.375
Salatiga	1.447	Kendal	80.193
Magelang	3.160	Magelang	132.045
Surakarta	1.920	Jepara	119.105

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Pemilu selanjutnya di selenggarakan pada Orde Baru dimana NU kemudian berfusi dengan partai dan organisasi Islam menjadi PPP. Perbandingan perolehan suara NU pada pemilu tahun 1971 dan 1977 setelah NU berfusi menjadi PPP dijelaskan dalam tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Pemilihan Umum Tahun 1971 dan 1977 di Kota Semarang

Partai Politik	Perolehan Suara		
	Tahun 1971	Partai Politik	Tahun 1977
Partai Nahdlatul Ulama	39.352	PPP	100.175
Partai Nasional Indonesia	46.752	PDI	83.926
Golongan Karya (Golkar)	164.996	Golkar	206.895

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Peran Organisasi Partai Nahdlatul Ulama di Kota Semarang. Status NU yang berubah menjadi partai juga harus menyesuaikan diri dengan budaya politik pada masa itu yang memiliki organisasi-organisasi partai. Pada tahun 1950, Partai NU di Kota Semarang hanya memiliki dua organisasi politik yaitu GP Ansor dan Muslimat/Fatayat NU meski kegiatan dua organisasi tersebut lebih banyak dibidang sosial tapi organisasi tersebut juga ikut dalam pergerakan politik di Kota Semarang. Memasuki pertengahan periode tahun 1950, NU mendirikan organisasi baru yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) pada penyelenggaran Konferensi

Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif) kemudian disusul Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) menjadi wadah bagi kader-kader NU yang beranggotakan santri senior dan mahasiswa yang mengajar agama di sekolah-sekolah Islam (Anam, 2010:281).

Organisasi-organisasi lainnya segera didirikan seperti Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Lembaga Seniman dan Budawayan Muslimin Indonesia (Lesbumi), berbagai organisasi lainnya yang bernaung dibawah NU. Pembentukan organisasi tersebut merupakan cara NU untuk mengimbangi kekuatan PKI yang mengalami peningkatan pesat sejak pemilu daerah tahun 1957. Dengan terbentuknya organisasi-organisasi tersebut, NU dapat memperoleh dukungan sekaligus merekrut kader-kader NU yang lebih luas dari berbagai lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak terkordinir (Fealy, 2003:146-303).

Pembentukan organisasi-organisasi tersebut cukup membantu NU dalam pergerakan politik NU terutama pada masa Demokrasi Terpimpin. Pada tahun 1964, Partai NU melakukan intruksi untuk organisasi-organisasi partainya untuk melakukan penggerahan massa dalam rangka memperingati perayaan 17 Agustus 1964 di Kota Semarang. Penggerahan massa diikuti oleh pengurus Partai NU Kota Semarang, GP Ansor, pengurus LP Ma'arif, pengurus PMII Kota Semarang, pengurus IPNU Kota Semarang, Sarbumusi dan Pertanu Kota Semarang dengan perlengkapan dan persiapan yang matang. Penggerahan massa ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi NU di Kota Semarang yang pada waktu itu banyak dipengaruhi golongan kiri yang kemudian disusul kegiatan apel besar untuk persiapan ulang tahun Partai NU di Kota Semarang (Arsip GP Ansor) Organisasi-organisasi NU cukup efektif dalam pergerakan politik sesuai yang dibutuhkan partai. Seperti halnya ketika menjadi kader Nasakom pada pertengahan tahun 1965-an, Partai NU beserta organisasinya mengirim perwakilannya seperti berikut ini Sarbumusi: Djunaedi, Munif Syaifuddin, Amir Subagyo, dan Hasan, Lesbumi: Abdulmanan, Djoko Mulyono, dan Ichsan Putra, Pertanu: Ki Darso Hartono, H. Masrum dan

Imam, IPPNU: Achmad Zaenal Abidin, PMII: Muhammad Djunaidi. Muslimat: Ny. Ketodiardjo Adiani, Ansor: Imam Basori, NU: Mochammad Ridwan, UNU: Kusbandi, dan ISII: Doemari, S.H. Pendidikan kader Nasakom ditujukan untuk membentuk kader-kader yang berjiwa Nasakom dan mendukung Manipol Presiden Soekarno sebagai Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Sikap Elite Politik Partai NU. NU sering menunjukkan sikap yang luwes terutama dalam upaya untuk mempertahankan posisinya dalam pemerintahan. Selama periode 1950an kebijakan Partai NU selalu menarik perhatian terutama terhadap konsepsi Presiden Soekarno yang dilaksanakan secara bertahap antara tahun 1957 sampai 1960. Pada tahun 1957 Presiden Soekarno memperkenalkan konsepsinya bernama Demokrasi Terpimpin. Konsepsi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan konstituante. Reaksi partai politik terhadap konsepsi Presiden Soekarno beragam seperti PKI menyetujui, PNI dan PSII belum menentukan sikapnya, sedangkan NU, Masyumi dan Partai Katholik menolak. Sikap NU yang menolak konsepsinya membawa Soekarno bertemu dengan elit NU seperti KH Abdul Wahab Chasbullah dan Idham Chalid. Pertemuan Soekarno dengan elit NU tersebut berhasil mengubah sikap PBNU dan para pemimpin NU lainnya untuk mendukung konsepsinya setelah diadakan rapat pada 9 dan 10 Maret 1957 (Anam, 2010:278).

Lawan Politik. Langkah keluarnya NU dari Masyumi mendapat respon dari kalangan salah satunya dari Masyumi yang menuduh NU merupakan pemecah belat umat, padahal sebelum NU keluar dari Masyumi pada tahun 1947 PSII lebih dulu keluar dari Masyumi. Keluarnya NU dari Masyumi memang memberi kerugian bagi Masyumi terutama dalam hal pendukung dan kekuatan massa yang banyak mengurangi kekuatan Masyumi pada pemilu periode tahun 1950. Keputusan NU menjadi partai politik memang mendapat respon negatif dari Masyumi, namun cabang-cabang NU

diberbagai daerah mendukung keputusan tersebut meski ada sembilan cabang yang menolaknya.

Lawan-lawan politik juga menyerang pemimpin-pemimpin NU seperti KH Abdul Wahab Chasbullah dan Idham Chalid yang memang peranannya dalam politik begitu besar sehingga membawa NU selalu dekat dengan pemerintah. Banyak tuduhan negatif yang ditujukan kepada dua elit NU tersebut seperti kiai korupsi, pemecah belah umat, kiai Nasakom, oportunistis, dan partai plin-plan karena bisa merubah keputusan secara mendadak (Zuhri, 1999:69). Bagi NU, tuduhan-tuduhan tersebut merupakan cara NU berpolitik yang memegang prinsip *maslahat* dan *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi prinsip Partai NU.

Selain itu, kadang tuduhan tersebut juga dijadikan gurauan politik seperti ketika NU dianggap bagian dari PKI yang menyebut NU adalah PKI, namun hanya ditanggap santai. Tuduhan tersebut banyak terjadi pada masa era Orde Lama namun setelah peristiwa G30S/PKI dan memasuki era baru bernama Orde Baru, NU harus berfusi dan menjadi PPP merupakan strategi politik pemerintahan Orde Baru untuk melemahkan partai-partai Islam. Pelemahan tersebut bisa dilihat pada masa kampanye pemilu tahun 1971 dimana terjadi penyelewengan dan intimidasi di daerah-daerah dari pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut dikemukakan Subchan ZE dalam kampanye Partai NU di Lapangan Pancasila (Simpang Lima) Kota Semarang (Suara Merdeka, 8 Juni 1971).

Dari Partai ke Jam'iyyah: Muktamar NU Ke-26 di Kota Semarang Tahun 1979

Penyelenggaraan Konferensi Besar. Konferensi Besar diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 8 Mei 1975 di Jakarta. Penyelenggaraan konferensi tersebut akibat beredarnya isu mengenai status NU setelah berfusi menjadi PPP dan kelesuan di internal NU. Penyebabnya adalah banyaknya tokoh dan aktivis NU yang menjadi PNS telah mengundurkan diri karena adanya monoloyalitas jabatan kemudian meninggalkan NU dan banyak tokoh dan aktivis NU yang duduk menjadi pimpinan atau aktivis PPP fokus di PPP yang

pada umumnya menjabat sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat di semua tingkatan (Arsip Nahdlatul Ulama). Penyebab kelesuan diinternal NU dapat dipahami mengingat NU sedang dalam proses kembali menjadi *jam'iyyah* dan perkembangan politik di PPP yang menuntut peran tokoh-tokoh NU di dalam partai.

Tujuannya jelas yaitu untuk kembali menata kegiatan-kegiatan NU sebagai *jam'iyyah* yang mencakup bidang-bidang pendidikan, dakwah Islamiyah, sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain non politik, dan membangkitkan kembali semangat dan gairah melaksanakan pengabdian dikalangan *jam'iyyah* NU dengan melaksanakan kegiatan dibidang pendidikan, dakwah Islamiyah, mabarrat dan ekonomi, dan lain sebagainya sesuai dengan fungsi NU sebagai *jam'iyyah* (Arsip Nahdlatul Ulama). Pada konferensi tersebut, pembicaraan mengenai kembali menjadi *jam'iyyah* masih sebatas rencana. Baru pada Muktamar ke-26 di Semarang, pembicaraan tersebut dilanjutkan dengan merubah status NU dari partai politik menjadi *jam'iyyah*.

Pelaksanaan Muktamar NU ke-26 di Semarang. Muktamar ke-26 di Semarang diselenggarakan selama tujuh hari dari tanggal 5 sampai dengan 11 Juni 1979 yang bertempat di Gedung Olahraga di Semarang, Jawa Tengah. Pada Muktamar ini delegasi yang datang sejumlah 4.500 orang delegasi dari 343 cabang NU seluruh Indonesia (Fealy, 1997:58). Muktamar NU ke-26 merupakan proses kembali menjadi *jam'iyyah* berdasarkan *khittah* 1926, meskipun langkah tersebut masih setengah hati. Pada muktamar di Semarang NU ingin memperkuat kembali kegiatan-kegiatan *jam'iyyah* dengan mengembangkan program dasar lima tahun kedepan sesuai awal berdirinya tapi tidak ingin melepaskan dunia politik (Haidar, 2011:220).

Pelaksanaan Muktamar NU ke-26 berlangsung selama tujuh hari mulai tanggal 5 sampai 11 Juni 1979. Paruh pertama dari tujuh hari dihabiskan untuk dialog besar antara PBNU dan delegasi-delegasi daerah yang membicarakan program kerja PBNU sejak penyelenggraan muktamar terakhir di Surabaya. PBNU

menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang dibacakan Idham Chalid dan Achmad Syaichu yang kemudian disusul dengan tanggapan delegasi dari cabang-cabang daerah. Dalam laporannya, Idham Chalid menyampaikan aspek-aspek umum, eksternal dan politik sementara Achmad Syaichu merangkum aspek-aspek internal, organisasi dan bisnis. Masing-masing laporan dari dua tokoh tersebut menekankan bahwa periode delapan tahun terakhir adalah periode penuh dengan tantangan, kesulitan, dan bahkan ancaman terhadap eksistensi NU (Fealy dkk, 1997: 63). Karena sejak diberlakukannya fusi partai pada tahun 1973, muncul wacana dalam organisasi yaitu penyerahan kegiatan-kegiatan politiknya pada PPP yang baru dibentuk atau kembali statusnya sebagai *jam'iyyah*.

Dampak Politik dan Sosial Keagamaan NU Setelah Kembali Menjadi Jam'iyyah. Kegiatan politik NU tidak berjalan lama pasca penyelenggaraan Muktamar di Semarang. Kenyataan tersebut bisa dilihat adanya konflik internal antara anggota NU dengan MI (Muslimin Indonesia) yang memang sudah lama selalu berbeda pandangan. Perselisihan tersebut semakin memuncak menjelang pemilihan umum 1982. Unsur MI yang mendapat dukungan pemerintah berhasil menggusur sejumlah calon anggota DPR dari unsur NU dengan mengurangi calon-calonnya (Bruinessen, 1994:111). Pelemahan kegiatan politik NU juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru lewat kebijakan yang dikeluarkan Presiden Soeharto mengenai diberlakukannya asas tunggal yang diumumkan tahun 1983. Semua partai politik dan organisasi masyarakat menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi negara dan mengesampingkan Islam maupun pandangan-pandangan dunia yang lain. NU adalah organisasi besar pertama yang menerima asas tunggal lewat Munas Alim Ulama NU yang diselenggarakan tahun 1983 di Situbondo. Munas tersebut mengeluarkan dua keputusan yang menentukan yaitu mengikuti asas tunggal dan menarik diri dari politik praktis (Bruinessen, 1994:113).

Dampak sosialnya, NU kembali fokus pada kegiatan sosial keagamaannya, seperti mengaktifkan kembali fungsi pondok pesantren yang memiliki peran penting dalam perkembangan NU. Banyak kader-kader NU yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren yang menjadi tumpuan NU dalam menghadapi perubahan zaman. PBNNU mulai menggiatkan kembali organisasi *Robithoh Ma'ahidil Islamiyah* Indonesia yang dipimpin Achmad Syaichu. Pada perkembangannya, organisasi *Robithoh Ma'ahidil Islamiyah* Indonesia mampu menyatukan pondok pesantren terutama yang pengasuh-pengasuhnya terdiri dari ulama-ulama *Ahlussunnah Wal Jamaah*. PBNNU juga membentuk organisasi *Hai'ah Ta'mirul Masajid Indonesia* yang dipimpin Achmad Syaichu yang bergerak menangani masjid-masjid agar masjid selain menjadi tempat ibadah, juga bisa menjadi tempat berkomunikasi antar sesama umat Islam, disamping juga merupakan tempat sumber ilmu dengan melalui pengajian-pengajian yang dilakukan secara rutin (Arsip Nahdlatul Ulama).

Dengan demikian, Muktamar ke-26 di Semarang merupakan proses memantapkan NU kembali menjadi *jam'iyyah* dan menggiatkan kembali kegiatan-kegiatan sosial keagamaan NU pada program dasar pengembangan lima tahun kedepan. Keputusan-keputusan muktamar memang belum berhasil menarik NU dari politik praktis, tapi dengan mengembalikan status NU sesuai awal berdirinya telah berhasil menarik NU dari pentas nasional dan kembali sesuai *khittah* 1926 berdasarkan hasil muktamar selanjutnya di Situbondo.

SIMPULAN

Pembentukan NU Cabang Semarang NU diperkirakan tahun 1926, beberapa saat setelah berdirinya NU di Surabaya. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa Kiai Ridwan merupakan kiai dari Semarang yang juga ikut dalam perkumpulan ulama untuk mendeklarasikan pendirian NU di Surabaya. Kegiatan politik NU berawal dalam MIAI dan Masyumi kemudian berkembang dengan mengubah status *jam'iyyah* NU menjadi Partai

NU pada tahun 1952. Keputusan tersebut diikuti cabang-cabang NU di berbagai daerah termasuk Semarang. Semarang merupakan pusat politik di Jawa Tengah dan menjadi pusat NU di Jawa Tengah. Partai NU di Semarang dipimpin oleh Imam Sofyan pada pertengahan tahun 1950-an. Pada pemilu pertama tahun 1955, perolehan suara Partai NU di Semarang cukup memuaskan yaitu 19.292 hanya kalah dari PKI 92.172 dan PNI 27.619. Keberhasilan NU dalam pemilu tahun 1955 menjadi sebuah prestasi karena mampu bersaing dan termasuk dalam empat partai besar di Semarang.

Pemerintah Orde Baru mulai menata politik Indonesia dengan menetapkan dua partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan satu Golongan Karya (Golkar). Setelah adanya PPP, muncul wacana NU untuk kembali menjadi *jam'iyyah* dan kembali mengurus kegiatan sosial keagamaan yang kurang diperhatikan sejak NU menjadi partai politik. Keputusan tersebut kemudian ditetapkan dalam Konferensi Besar tahun 1975 dan Muktamar NU ke-26 di Semarang tahun 1979. Hasil keputusan muktamar yang menjadi perhatian adalah mengubah status NU dari partai politik menjadi *jam'iyyah* dan menyerahkan kegiatan politik pada PPP.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Koran

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Nahdlatul Ulama: 1952-1982*.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah. GP Ansor Provinsi Jawa Tengah: 1960-1984.

Harian *Suara Merdeka*, 29 Juli 1952.

Harian *Suara Merdeka*, 28 Februari 1957.

Harian *Suara Merdeka*, 19 Februari 1957.

Harian *Suara Merdeka*, 8 Juni 1971.

Buku dan Jurnal

Almanak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian. 1961. Departemen Penerangan.

Anam, Choirul. 2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Sidoarjo: Duta Aksara Mulia.

Bruinessen, Martin van. 1994. *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian baru*. Yogyakarta: Lkis.

- Cribb, Robert. 1990. *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Fealy, Greg. 2003. *Ijtihad Partai Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: Lkis. _____ dan Greg Barton (Ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan NU-Negara*. Yogyakarta: Lkis. Hal. 346-361.
- Gottschalk, Luis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Haidar, Ali. 2011. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik*. Sidoarjo: Al-Maktabah.
- Kasmadi dan Wiyono. 1985. *Sejarah Sosial Kota Semarang: 1900-1950*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shokheh, Muhammad. 2014. *Gerakan Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Pati: Kireinara.
- Siregar, Insan Fahmi. 2014. *Partai Masyumi dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Yusuf, Slamet Effendi, dkk. 1983. *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*. Jakarta: CV Rajawali.
- Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Penulisan Sejarah*. Semarang: Unnes Press.
- Zuhri, Saifuddin. 1999. *Al Maghfurlah KH. A Wahab Chasbullah*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.